

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Persediaan

Persediaan merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Hal tersebut karena sebagian besar kekayaan perusahaan ditanamkan dalam bentuk persediaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) No.09 tahun 2018, persediaan adalah aset:

- a. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
- b. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau
- c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Dewi, dkk (2017: 128), “Persediaan adalah aset lancar berupa barang jadi yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan bahan yang diproses dalam proses produksi atau bahan yang disimpan untuk produksi.”

Sedangkan pengertian persediaan menurut Martani, dkk (2016: 245), “Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya dan suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada *nature business* suatu entitas.”

Effendi (2015: 217) menyatakan bahwa “Persediaan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang akan tergantung pada jenis usaha perusahaan.”

Berdasarkan definisi dari para ahli diatas, dapat dinyatakan bahwa persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan atau barang yang masih dalam pengerjaan, ataupun barang dalam bentuk bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Persediaan harus diperhatikan secara rutin agar kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

2.2 Jenis-jenis Persediaan

Persediaan dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari jenis perusahaan dan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan, apakah itu perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang. Weygandt, dkk (2018: 296) menyatakan bahwa:

Perusahaan dagang hanya perlu satu klasifikasi persediaan, yaitu persediaan barang dagang, untuk menjelaskan banyak jenis yang berbeda yang membentuk total persediaan, sedangkan pada perusahaan manufaktur beberapa persediaan mungkin belum siap untuk dijual. Akibatnya, perusahaan manufaktur biasanya mengklasifikasikan persediaan menjadi tiga kategori:

- a. Persediaan barang jadi (*finished goods inventory*) merupakan barang produksi yang selesai diproses dan siap untuk dijual.
- b. Persediaan dalam proses (*work in process inventory*) merupakan bagian persediaan barang produksi yang telah masuk proses produksi tetapi belum selesai.
- c. Persediaan bahan baku (*raw materials*) merupakan barang-barang dasar yang akan digunakan dalam produksi tetapi belum dimasukkan ke dalam proses produksi.

Menurut Mulyadi (2017: 463), “Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari: persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. Sedangkan dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagang, yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali.”

Menurut Dewi, dkk (2017: 128), “Persediaan di perusahaan dagang hanya diklasifikasikan sebagai persediaan barang dagang (*merchandise inventory*) sedangkan di perusahaan manufaktur persediaan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu persediaan barang jadi (*finished goods*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan bahan baku (*materials*).”

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa persediaan terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan jenis dan kegiatan usaha perusahaan. Persediaan bagi perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang, sedangkan bagi perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari tiga jenis, yaitu persediaan bahan baku (*raw materials*), persediaan barang dalam proses (*work in process inventory*) dan persediaan barang jadi (*finished goods inventory*).

2.3 Biaya-Biaya Yang Dimasukkan Dalam Persediaan

Masalah dalam menentukan besarnya persediaan sangatlah penting bagi perusahaan, karena persediaan memiliki efek secara langsung terhadap keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Kesalahan dalam menentukan persediaan akan berakibat pada turunnya keuntungan perusahaan. Martani, dkk (2016: 249) menyatakan bahwa biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

1. Biaya Pembelian

Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat direstitusi kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang, potongan dan lainnya serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

2. Biaya konversi

Biaya Konversi merupakan biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang dalam produksi. Biaya ini meliputi biaya yang secara langsung yang terkait dengan unit yang diproduksi, termasuk juga alokasi sistematis biaya overhead produksi yang bersifat tetap ataupun variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. Untuk biaya overhead yang bersifat variabel, maka biaya tersebut dialokasikan berdasarkan kapasitas fasilitas produksi normal. Apabila suatu entitas mengalami produksi yang rendah, maka, pengalokasian jumlah overhead tetap per unit produksi tidak bertambah dan overhead yang tidak teralokasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Sebaliknya apabila suatu entitas mengalami produksi yang tinggi di luar normalitas produksinya, maka jumlah overhead tetap yang dialokasikan pada tiap unit produksi menjadi berkurang sehingga persediaan tidak diukur di atas biayanya.

3. Biaya Lainnya

Biaya Lain yang dapat dibebankan sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang termasuk biaya lainnya misalnya biaya desain dan biaya praproduksi yang ditujukan untuk konsumen yang spesifik. Sedangkan biaya-biaya seperti penelitian dan pengembangan, biaya administrasi dan penjualan, biaya pemborosan, biaya penyimpanan tidak dapat dibebankan sebagai biaya persediaan.

Menurut SAK EMKM No. 09 (2018: 21), “Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang

terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan.” Kebijakan akuntansi yang terdapat dalam SAK EMKM juga menyatakan bahwa jika SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan penganturan yang ada dalam SAK EMKM, tetapi jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif.

Adapun kriteria UMKM berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Sasongko, dkk (2018: 302) persediaan barang dagang dicatat oleh perusahaan sebesar harga perolehannya. Adapun biaya yang termasuk dalam biaya persediaan barang dagang yang dicatat oleh perusahaan saat diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Biaya yang Termasuk dalam Biaya Persediaan Barang Dagang

HARGA BELI BARANG DAGANG	
-/-Potongan harga pembeli	+/ Ongkos angkut pembelian Pajak-pajak yang berlaku Bea masuk impor, jika ada Asuransi selama barang dalam perjalanan, jika ada

Berdasarkan biaya-biaya yang dimasukkan dalam persediaan yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa biaya persediaan terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi yang siap untuk digunakan atau dijual.

2.4 Metode Pencatatan Persediaan

Dalam ilmu akuntansi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mencatat persediaannya. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan pencatatan persediaan menurut Effendi (2015: 218), yaitu:

1. Metode fisik

Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan (*stock opname*) ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Dalam metode ini mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian maka harga pokok penjualan baru dapat dihitung apabila persediaan akhir sudah dihitung.

Perhitungan harga pokok penjualan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Persediaan barang awal	Rp xxx
Pembelian (neto)	<u>xxx (+)</u>
Tersedia untuk dijual	Rp xxx
Persediaan barang akhir	<u>xxx (-)</u>
Harga pokok penjualan	Rp xxx

2. Metode Buku (Perpetual)

Dalam metode buku setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Rincian dalam buku pembantu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku besar. Setiap perubahan dalam persediaan diikuti

dengan pencatatan dalam rekening persediaan, sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo dalam rekening persediaan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2016: 197) menyatakan bahwa sistem pencatatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan persediaan ada 2 (dua), yaitu:

1. Sistem Periodik
Sistem periodik mencatat persediaan hanya pada saat perhitungan fisik untuk mengetahui saldo akhir perusahaan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menjamin keakuratan besarnya persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, juga untuk mengamankan atau mencegah aset perusahaan (persediaan) dari tindakan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan kerusakan.
2. Sistem Perpetual
Sistem perpetual mencatat kuantitas persediaan dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Sistem pencatatan secara perpetual ini dapat memberikan pengendalian yang efektif atas persediaan, karena informasi mengenai persediaan dapat segera tersedia dalam buku besar pembantu untuk masing-masing persediaan. Dalam sistem pencatatan perpetual, hasil dari perhitungan fisik akan dibandingkan dengan data persediaan yang tercatat dalam buku besar untuk menentukan besarnya kekurangan yang ada atas saldo fisik persediaan. Dalam sistem pencatatan perpetual, pemeriksaan fisik dilakukan bukan untuk menghitung saldo akhir persediaan melainkan sebagai pengecekan saling mengenai keabsahan atas saldo persediaan yang dilaporkan dalam buku besar persediaan.

Sedangkan Mulyadi (2017: 465) menjelaskan ada dua metode macam metode pencatatan persediaan yaitu:

1. Metode Mutasi Persediaan (*Perpetual Inventory Method*)
Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Metode mutasi persediaan ini cocok untuk digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan.
2. Metode Persediaan Fisik (*Physical Inventory Method*)
Dalam metode persediaan fisik, hanya penambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan tidak dicatat karena tidak memakai kartu persediaan. Untuk mengetahui berapa harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui sisa persediaan yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi. Harga pokok

persediaan awal periode ditambah dengan harga pokok persediaan yang dibeli selama periode dikurangi dengan harga pokok persediaan pada akhir periode merupakan harga pokok persediaan yang dipakai selama periode akuntansi yang bersangkutan. Metode persediaan fisik ini cocok untuk digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses.

Metode pencatatan persediaan menurut Sugiono (2016: 106) adalah sebagai berikut:

- a. Metode Perpetual, pada sistem ini setiap melakukan pembelian barang dagangan berarti menambahkan (mendebet) perkiraan persediaan dan sebaliknya mengurangi (mengkredit) apabila terjadi transaksi penjualan
- b. Metode Periodik, pada sistem ini setiap penjualan dan pembelian tidak dicatat pada perkiraan persediaan barang dagang (*merchandise inventory*), mutasi barang dagang tidak dicatat, sehingga untuk mengetahui berapa harga pokok barang dagangan yang terjual (*cost of merchandise sold*) harus dilakukan terlebih dahulu perhitungan secara fisik.

Berdasarkan metode pencatatan persediaan di atas, dapat dinyatakan bahwa metode pencatatan persediaan terbagi menjadi dua, yaitu metode periodik (fisik) dan metode perpetual (buku), namun apabila dibandingkan cara pencatatan yang lebih baik adalah metode perpetual yang dapat membantu perusahaan untuk mengetahui jumlah persediaannya sewaktu-waktu dan kapan saja tanpa harus melakukan pengecekan secara langsung ke gudang serta mempermudah perusahaan dalam penyusunan laporan laba rugi dan neraca pada akhir periode akuntansi.

2.5 Metode Penilaian Persediaan

Permasalahan dalam menentukan saldo akhir persediaan dan beban pokok penjualan dalam sebuah perusahaan kemungkinan akan ada, hal tersebut timbul karena adanya persediaan barang dagang yang ada di perusahaan dibeli dengan harga yang tidak stabil selama satu periode (misalnya, satu bulan atau satu tahun). Maka dari itu perusahaan dapat menggunakan salah satu metode penilaian

persediaan untuk memudahkan perusahaan dalam menentukan beban pokok penjualannya.

Menurut ikatan akuntansi Indonesia atau IAI (2016: 198) terdapat tiga asumsi arus biaya yang bisa digunakan oleh perusahaan, yaitu:

1. *First in, first out* / Masuk Pertama Keluar Pertama (*FIFO/MPKP*), Metode FIFO mengasumsikan beban pokok persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Nilai persediaan akhir adalah beban pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli.
2. Rata-rata Tertimbang (*Average Cost Method*), biaya unit persediaan merupakan biaya rata-rata pembelian.
3. *Last in, first out* / Masuk Terakhir Keluar Pertama (*LIFO/MTKP*), Metode LIFO mengasumsikan beban pokok persediaan dari barang yang terakhir dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai beban pokok penjualan. Tetapi metode ini tidak diperkenankan lagi oleh SAK.

Sedangkan menurut Sasongko, dkk (2018: 303) terdapat empat asumsi arus biaya yang dapat digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan dari persediaan barang dagang, yaitu:

1. Metode Identifikasi Khusus (*Specific Identification Method*)
Metode ini dapat digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan jika perusahaan dapat menentukan dengan tepat dari manakah transaksi pembelian dan persediaan yang dijual tersebut berasal. Metode ini sesuai untuk unit persediaan yang dapat dipisahkan untuk proyek tertentu atau unit persediaan yang tidak dapat ditukar dengan persediaan lain (*not-ordinary interchangeable*)
2. Metode *First In First Out (FIFO)*
Dengan metode FIFO, harga perolehan dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi beban pokok penjualan dari barang dagang yang dijual pertama kali pula.
3. Metode *Last In First Out (LIFO)*
Dengan metode LIFO, harga perolehan dari barang yang terakhir kali dibeli akan menjadi beban pokok penjualan dari barang dagang yang dijual pertama kali.
4. Metode biaya rata-rata
Dengan metode biaya rata-rata, beban pokok penjualan barang dagang yang dijual adalah rata-rata dari biaya persediaan barang dagang awal dan seluruh pembelian yang dilakukan pada satu periode.

SAK EMKM NO. 09 (2018: 21) menyatakan bahwa “Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan.”

Menurut Martani, dkk (2016: 258) ada 2 cara yang digunakan untuk menetapkan harga perolehan yang akan digunakan untuk menghitung nilai persediaan akhir yaitu :

1. Metode Laba Kotor Metode ini menghitung persediaan dengan mengestimasi jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, dan persentase laba bruto. Metode ini biasanya dipakai untuk mengestimasi nilai persediaan ketika entitas mengalami kebakaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan perusahaan.
2. Metode Ritel/Eceran Metode ritel merupakan metode pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang di nilai ritelnya menjadi nilai biaya. Metode ini banyak dipakai oleh entitas perdagangan yang memiliki banyak sekali jenis barang dengan nilai per barangnya tidak besar. Entitas perdagangan dapat menghitung persediaan fisik pada harga ritel atau mengestimasi persediaan akhir ritel dan kemudian menggunakan rasio *cost-to-retail* untuk mengestimasi nilai persediaan pada nilai biaya.

Berdasarkan metode pencatatan persediaan di atas, dapat dinyatakan bahwa metode pencatatan persediaan terbagi menjadi beberapa metode. Pemilihan metode penilaian persediaan dalam menentukan saldo akhir persediaan dan beban pokok penjualan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keuangan perusahaan. Setiap metode penilaian persediaan yang telah dijelaskan diatas, akan menghasilkan nilai beban pokok penjualan yang berbeda-beda. Tetapi metode LIFO tidak diperkenankan lagi oleh SAK.

2.6 Perbandingan Metode Penilaian Persediaan

Warren, dkk (2017) menyatakan bahwa metode persediaan FIFO dan Rata-rata Tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk :

1. Beban pokok penjualan
2. Laba bruto
3. Laba neto
4. Persediaan akhir

Perbedaan-perbedaan tersebut diakibatkan dari adanya kenaikan dan penurunan biaya (harga) perolehan. Jika biaya (harga) perolehan tetap sama,

kedua metode akan memberikan hasil yang sama. Berikut ini disajikan efek dari perubahan biaya (harga) perolehan pada metode FIFO dan Rata-rata Tertimbang.

Tabel 2.2
Pengaruh Perubahan biaya (harga) perolehan Metode FIFO dan Rata-rata Tertimbang (WA)

	+ Peningkatan biaya (harga) perolehan		- Penurunan biaya (harga) perolehan	
	↑ Jumlah Tertinggi	↓ Jumlah Terendah	↑ Jumlah Tertinggi	↓ Jumlah Terendah
Beban pokok penjualan	WA	FIFO	WA	FIFO
Laba bruto	FIFO	WA	WA	FIFO
Laba neto	FIFO	WA	WA	FIFO
Persediaan akhir	FIFO	WA	WA	FIFO

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016: 205) jika biaya perunit tetap stabil, seluruh metode akan mendapatkan hasil yang sama. Akan tetapi, jika harganya berubah-ubah, tiga metode tersebut biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk:

1. Beban pokok penjualan untuk periode berjalan
2. Persediaan akhir
3. Laba kotor (dan laba bersih) untuk periode tersebut.

Jika terjadi kenaikan harga pada setiap pembelian, metode FIFO akan menghasilkan jumlah paling rendah untuk beban pokok penjualan, serta jumlah paling tinggi untuk laba kotor (laba bersih), dan juga persediaan akhir. Untuk metode LIFO menghasilkan jumlah paling tinggi untuk beban pokok penjualan, serta jumlah paling rendah untuk laba kotor (laba bersih), dan juga persediaan akhir. Sedangkan metode biaya rata-rata menghasilkan jumlah diantara yang dihasilkan FIFO dan LIFO.

2.7 Akibat Kesalahan dalam Pencatatan Persediaan

Kesalahan dalam persediaan kadang kala bisa saja terjadi, kesalahan tersebut biasanya disebabkan oleh kegagalan dalam menghitung dan menentukan harga persediaan. Kesalahan dalam persediaan menurut Weygandt, dkk (2018: 309) akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yaitu:

1. Pengaruh pada Laporan Laba Rugi
Persediaan akhir dari satu periode akan secara otomatis menjadi persediaan awal periode berikutnya. Jadi, kesalahan persediaan akan mempengaruhi beban pokok penjualan maupun laba neto di dua periode. Apabila kesalahannya mengurangsajikan persediaan awal,

maka beban pokok penjualan akan menjadi kurang saji. Apabila kesalahannya mengurangsajikan persediaan akhir, maka beban pokok penjualan akan menjadi lebih saji.

2. Pengaruh terhadap laporan posisi keuangan

Perusahaan dapat menentukan pengaruh kesalahan persediaan akhir terhadap laporan posisi keuangan menggunakan persamaan dasar akuntansi: $Aset = Liabilitas + Ekuitas$.

- a. Apabila persediaan akhir mengalami lebih saji, maka aset dan ekuitas juga akan lebih saji, sedangkan liabilitas tidak berpengaruh.
- b. Apabila persediaan akhir mengalami kurang saji, maka aset dan ekuitas juga akan kurang saji, sedangkan liabilitas tidak berpengaruh.

Sedangkan menurut Warren, dkk (2017: 358) Setiap kesalahan dalam persediaan yang terjadi akan memengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Beberapa alasan terjadinya kesalahan persediaan adalah sebagai berikut:

1. Persediaan fisik yang ada di tangan salah hitung.
2. Biaya-biaya dialokasikan secara tidak benar ke dalam persediaan.
3. Persediaan yang ada di pengiriman dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan.
4. Persediaan konsinyasi dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan.

Berdasarkan akibat kesalahan dalam pencatatan persediaan yang telah dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa kesalahan dalam pencatatan persediaan dapat disebabkan karena adanya pencatatan dan perhitungan persediaan yang tidak tepat bagi perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan nilai persediaan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.